



**UNIVERSITI
MALAYA**



**PERSIDANGAN
ANTARABANGSA
HUBUNGAN
MALAYSIA-INDONESIA V**

**TEMA :
MEMAHAMI JATI DIRI DALAM
MENGHARUNGI CABARAN SEMASA**

**12 - 14 JULAI 2011
FAKULTI SASTERA DAN SAINS SOSIAL
UNIVERSITI MALAYA
KUALA LUMPUR, MALAYSIA**

Estimasi harga tiket

MENGGALI DAN MEREVITALISASI NILAI-NILAI *CROSS CULTURE* DEMI MEMPERKASAKAN HUBUNGAN ANTAR BUDAYA DAN BANGSA

Oleh Hasanuddin

Kajian Budaya Minangkabau
Universitas Andalas
hasanuddin@fsastra.unand.ac.id
hasanuddin17@gmail.com

ABSTRAK

Pluralitas adalah fitratullah dan sunnatullah. Perbedaan dan konflik menjadi lumrah bahkan niscaya dalam dinamika sosio kultural. Walaupun demikian, keniscayaan yang sama pentingnya adalah harmoni. Dalam dinamika historis ditunjukkan bahwa konflik-konflik dan kesadaran pluralitas melahirkan kearifan-kearifan *cross cultural* dalam membangun harmoni. Namun, kearifan lokal (*local wisdom*) demikian menjadi surut perannya dalam kehidupan modern akhir-akhir ini sehingga perbedaan menjadi faktor pengancam bagi harmoni.

Makalah ini menyajikan hasil penelitian terhadap beberapa representasi budaya Melayu Minangkabau Sumatera Barat yang menunjukkan kearifan manajemen perbedaan dan konflik sehingga pluralitas diperkaya secara seiring sejalan dengan pemeliharaan harmoni. Penelitian dimaksud meliputi historiografi tradisional (*tambo*) Minangkabau, adat akomodasi kekerabatan di *ranah* dan di *rantau* (di dalam dan di luar *cultural domain* Minangkabau), serta seni konflik dan sastra debat.

Nilai-nilai yang terefleksi dari representasi budaya tersebut adalah: prinsipilnya identitas, niscayanya perbedaan dan persaingan, dan pentingnya mediasi bagi transformasi konflik dari manifestasi anarkhis menjadi beradab. Pada Tambo Minangkabau dikisahkan betapa konflik dengan penyerang dari seberang laut (Majapahit) telah di hadapan mata, tetapi dapat dimediasi melalui diplomasi, berupa adu kerbau dan teka-teki. Pada tradisi akomodasi kekerabatan terefleksi nilai kolektivisme plural yang memediasi akomodasi dan penyetaraan individu tanpa memandang etnik asal dan keturunan. Pada seni konflik dan sastra debat justru yang ditonjolkan adalah keniscayaan persaingan (yang dimungkinkan oleh identitas yang senantiasa dipupuk dan diperkukuh sehingga menegaskan perbedaan) di antara individu dan kelompok yang ada. Namun, persaingan tersebut dimediasi melalui kesenian dan kesasteraan sehingga manifestasinya bertransformasi dari anarkhis menjadi etis dan estetis, sehingga mampu melahirkan sintesis-sintesis ideal demi kemajuan masyarakat.

Nilai budaya tersebut dapat dikembangkan dalam memperkasakan hubungan bangsa serumpun, terutama Indonesia dan Malaysia.

Kata kunci: Identitas, Perbedaan, Persaingan, dan Mediasi Transformasi Konflik

PENDAHULUAN

Pluralitas adalah fitratullah. Perbedaan dalam kelompok bahkan sering kali sama kompleksnya dengan antarkelompok. Oleh karena itu, interaksi intra-antarkelompok, intra-antaretnik dan intra-antarbangsa tidak terpisahkan dari konflik. Konflik merupakan prihal yang lumrah—bahkan terkadang menjadi niscaya karena diperlukan—bagi berlangsungnya dinamika sosial.

Pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, perbedaan tidak saja disadari akan tetapi dibangun dari dalam. Tidak hanya itu, perbedaan diboboti pula dengan etos “harga diri” untuk selalu bersaing dengan yang lain. Oleh karena itu, konflik juga *built in* tetapi dikontrol dengan “budi” agar dinamika harmoni juga terpelihara (Nasroen, 1971; Navis, 1984; Naim, 1983). Perbedaan, kesetaraan, konflik (tesis-antitesis), dan harmoni (konsensus dan sintesis) menjadi bagian integral ideologis Minangkabau itu dalam interaksi sosio kultural. Hal itu menjadi ruh bagi kearifan lokal *cross culture* mereka.

Tambo (historiografi tradisional) Minangkabau mengisahkan bahwa kearifan diplomatik sangat diperlukan dalam interaksi *cross cultural*. Hal itu ditunjukkan ketika pasukan dari luar (Majapahit) datang hendak menguasai Ranah Minangkabau. Pendekatan diplomatik mampu mengalirkan potensi konflik melalui mediasi transformasi berupa teka-teki dan adu kerbau. Kearifan lokal Minangkabau itu juga diindikasikan oleh ekspresi budaya lain seperti akomodasi kekerabatan, seni konflik, dan sastra debat yang masih berkembang hingga hari ini.

Fenomena aktual beberapa tahun terakhir justru menunjukkan betapa kearifan lokal itu telah surut perannya. Perbedaan justru menjadi dasar pengelompokan, sentimen, dan segregasi atau pemisahan sosial. Hal itu tidak hanya terjadi pada hubungan antar bangsa tetapi intra bangsa atau intra etnik pun hal itu mengemuka. Di Indonesia hal itu juga tidak lepas dari proses historis negara-bangsa yang selama setengah abad lebih diarahkan kepada “tunggal ika” bukan ke-“bhinneka”-an. Kebijakan ketunggalikaan itu ternyata bertentangan dengan semangat kebhinnekaan yang hidup di jantung hati masyarakat Indonesia. Ketika arus tuntutan kebhinnekaan begitu kuat dan pemegang kekuasaan ketunggalikaan tak mampu membendungnya, maka yang terjadi adalah eforia reformasi yang kebablasan. Masa setengah abad dalam cengkeraman kekuasaan sentralistik dan otoriter telah menimbulkan distorsi dan kontaminasi terhadap

kearifan *cross cultural* yang hidup dalam masyarakat Nusantara pra kemerdekaan NKRI.

Dalam logika struktural kekuasaan sentralistik, kesadaran perbedaan (SARA) adalah ancaman, karena itu harus diminimalisasi kalau tidak dimatikan. Konflik tidak memiliki dan diberi tempat dalam dinamika perbedaan. Padahal, dalam filsafat dialektika Hegelian, konflik justru dipandang positif dan konstruktif. Menurut Hegel, proses dialektika dan perkembangan pemikiran sangat menentukan bagi perkembangan sejarah masyarakat. Setiap konsep atau fenomena akan menyebabkan terjadinya negasi atau antitesis serta sintesis sebagai pemecahan terhadap kontradiksi itu tadi. Demikian seterusnya, suatu sintesis sebagai resolusi akan menyebabkan munculnya antitesis yang baru lagi. Konflik bukan sesuatu yang disfungsi, destruktif, atau patologis, tetapi justru positif, konstruktif, dan fungsional bagi terpeliharanya struktur sosial.

Konflik dan konsensus, integritas dan perpecahan, merupakan proses fundamental dan bagian dari setiap sistem sosial yang dapat dipahami (Polloma, 1994:80-129). Dahrendorf (1986) juga berpendapat bahwa konflik menjadi kunci bagi struktur sosial dan fungsional bagi perkembangan dan perubahan sosial. Oleh karena itu, segala usaha untuk menekan konflik tidak diperlukan, tetapi yang terpenting adalah mengaturnya melalui suatu institusionalisasi.

Galtung (2005) mengkritik kecenderungan pembicaraan konflik lebih dominan pada kekerasan dan kontrol atasnya daripada soal penyelesaian dan perdamaian, lebih tertarik pada pendekatan keamanan daripada kemampuan (*viability*), dan sangat sedikit berbicara soal pencegahan. Lebih jauh Galtung menyatakan bahwa penelitian konflik dan perdamaian tidak bebas budaya. Setiap budaya, menurutnya, memiliki endapan-endapan pengalaman bersama perihal konflik, kekerasan, dan perdamaian (sebagai lawan dari kekerasan). Demikian pula, setiap budaya memiliki lapisan-lapisan arkeologi yang lebih dalam dari budaya, begitu dalamnya sehingga sedimen-sedimen itu tidak lagi terpantul. Untuk itu diperlukan penggalian agar mendapat sinar.

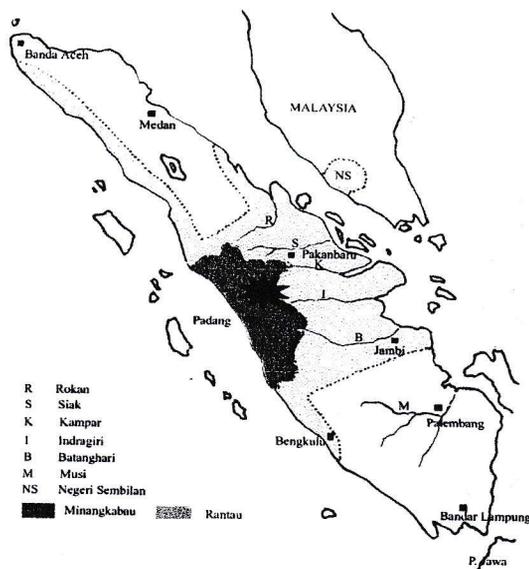
Fenomena dalam sejarah sosio kultural Minangkabau Sumatera Barat menunjukkan perihal kesamaan dengan pandangan teori konflik di atas. Hal itu ditunjukkan secara khusus pada kearifan lokal *intercultural* melalui institusionalisasi tradisi *malakok*, tradisi intelektual, permainan rakyat dan kesenian (seni pertarungan dan *satra debat/ dialogis*). Institusi-institusi tersebut memegang peranan penting dalam

proses integrasi dan harmoni sosial dalam dinamika multikultural. Agaknya, topik kearifan lokal *intercultural* dalam konteks Minangkabau Sumatera Barat ada dalam konteks sedimen-sedimen arkeologis menurut Galtung di atas. Itulah kearifan lokal (*local wisdom*) *cross culture* yang patut digali dan direvitalisasi.

SUMATERA BARAT, MINANGKABAU, DAN MELAYU

Sumatera Barat dan Minangkabau adalah dua konsep yang berbeza tetapi memiliki ruang asosiasi dan territorial yang lebih kurang sama. Ketika seseorang menyatakan diri sebagai orang Sumatera Barat maka secara asosiasif orang lain akan mengidentikkannya dengan orang Minangkabau. Demikian pula ketika seseorang menyatakan diri sebagai orang Minangkabau maka asosiasi orang lain atasnya identik dengan orang Sumatera Barat. Hal itu erat kaitannya dengan fakta bahwa sebagian besar wilayah territorial Sumatera Barat adalah juga wilayah Minangkabau, walaupun kalau ditelisik lebih dalam kedua konsep itu berbeza.

Sumatera Barat merupakan kesatuan wilayah administratif (provinsi) dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk setelah Indonesia merdeka. Sumatera Barat didiami oleh etnik Minangkabau sebagai mayoritas ditambah etnik Mentawai dan Mandailing. Berbeza dari itu, Minangkabau adalah konsep sosio-kultural tentang suatu etnik (tidak termasuk Mentawai dan Mandailing) yang mendiami sebagian besar wilayah propinsi Sumatera Barat, sebagian provinsi Riau, sebagian provinsi Jambi, dan beberapa daerah di sekitarnya bahkan sampai ke Negeri Sembilan di Malaysia. Peta di bawah ini menunjukkan wilayah kultural etnik Minangkabau yang meliputi daerah inti *luhak* (bintang), rantau utama di Sumatera Barat (bagian yang diarsir tebal), dan *rantau* di luar Sumatera Barat (bagian yang diarsir terang).



Peta Wilayah Kultural Minangkabau
(Adaptasi atas Peta dalam Naim, 1984:65)

Masyarakat Minangkabau, secara mitologis menghubungkan keturunan mereka secara hierarkhis dengan Iskandar Zulkarnain (*Alexander the Great*) yang hidup antara tahun 356-323 S.M dari Masedonia. Dalam historiografi tradisional mereka, *tambo*, disebutkan bahwa Iskandar Zulkarnain memiliki tiga orang putra, yaitu Maharaja Alif, Maharaja Dipang, dan Maharaja Diraja. Dalam pelayaran mereka, ketiganya berpisah dan menjadi raja di tempat pendaratan masing-masing, yaitu Maharaja Alif menjadi raja di Banua Ruhum (Romawi Timur atau Byzantium), Maharaja Dipang menjadi raja di Banua Cino (negeri Cina dan Jepang), dan Maharaja Diraja menjadi raja di Minangkabau (Navis, 1984:46-48; Naim, 1984:60).

Benang merah kultural yang dapat diidentifikasi sebagai tali temali hubungan Minangkabau dengan Iskandar Zulkarnain adalah pertemuan tiga kebudayaan, yaitu kebudayaan Yunani, Cina, dan India; yang ketiganya memberi warna dominan dalam sistem sosiokultural Minangkabau. *Nagari-nagari* Minangkabau menunjukkan persamaan dengan “polis” atau ‘negara kota’ di Yunani Kuno (Mansoer dkk, 1970: 23). Pengaruh kebudayaan Cina ada pada sistem *bersuku-suku* (*clan*) yang mengharuskan perkawinan eksogami antar *suku*; dan ajaran persamaan antar manusia sebagai unsur alam yang berada di bawah lindungan satu langit, sebagaimana dikembangkan filsuf Cina Meng Tze (Mencius) yang hidup semasa dengan Iskandar Zulkarnain (Manggis,

1971:144). Unsur kebudayaan India, baik Hinduisme maupun Budhisme, terlihat pada sistem *lareh nan duo*, yaitu dua sistem kepemimpinan yang paradoks satu sama lain, yaitu *lareh* Koto Piliang yang berciri aristokratis dan *lareh* Bodi Caniago yang berciri demokratis (Navis, 1984: 54-57).

Kesatuan sosio-politik dan teritorial tertinggi di Minangkabau adalah *nagari*. Dalam rumusan tradisional Undang-Undang *Nagari* disebutkan ada enam belas pasal yang menjadi prasyarat sebuah *nagari*, yaitu *babalai-bamusajik*, *basuku-banagari*, *bakorong-bakampung*, *bahuma-babendang*, *balabuah-batapian*, *basawah-baladang*, *bahalaman-bapamedanan*, dan *bapandam-bapusaro* (berbalai-bermasjid, bersuku-ber*nagari*, berkorong-berkampung, berhuma-berbenderang/ 'pos pertahanan keamanan dan penerangan', berlabuh-bertepi/ 'jalan raya, pelabuhan, dan tempat mandi', bersawah-berladang, berhalaman-berpamedanan/ 'sarana permainan dan olahraga', dan berpandam berpusara/ pekuburan umum)(Navis, 1984: 91-94).

Secara paradigmatis, keenambelas pasal itu mengatur bahwa sebuah *nagari* harus memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut. (1) **Wilayah** kediaman berupa korong dan kampung, dengan batas-batas tertentu yang jelas, baik dengan penanda alam (pohon besar, sungai, gunung, dll) atau penanda yang dibuat manusia berupa parit atau tanaman bambu/ aur berduri. Wilayah yang berada di lingkaran pusat pemerintahan disebut *korong*, sedangkan wilayah satelit atau *hinterland* disebut *kampung*, yang dinamai sesuai dengan kondisinya seperti *koto*, *dusun*, atau *taratak* (makna *bakorong bakampung*).¹ (2) **Penduduk** yang berhimpun secara kolektif dalam *clan/ suku-suku* sehingga jelas *sukunya* dan (kalau merupakan pendatang) juga jelas *nagari* asalnya (makna *basuku banagari*). (3) **Pemerintah** selaku pelaksana roda pemerintahan, baik di bidang legislatif maupun eksekutif dan yudikatif, yang berpusat di *balai* atau *balairung*, (yaitu sarana pemerintahan, permusyawaratan, dan penegakan hukum); juga ulama

¹ Taratak, Dusun, dan Koto dapat dijelaskan sebagai berikut. (1) Taratak berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti emperan atau bagian luar rumah. Taratak adalah pemukiman yang paling luar dari kesatuan *nagari*, perladangan dengan beberapa huma di dalamnya. Pimpinannya disebut *tuo* (ketua), belum mempunyai penghulu, maka rumahnya belum boleh bergonjong. (2) Dusun merupakan perkembangan dari taratak, penduduknya lebih banyak, telah memiliki tempat ibadah seperti *surau* (rumah ibadah yang lebih rendah statusnya dari masjid, belum dibolehkan melaksanakan shalat Jumat), telah dapat mendirikan rumah gadang dengan dua gonjong, tetapi belum memiliki penghulu; telah boleh melaksanakan kenduri atau perhelatan perkawinan, tetapi belum boleh melakukan hak bantai (memotong ternak berkaki empat). (3) Koto adalah pemukiman yang telah mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti *nagari*, dipimpin oleh para penghulu, tetapi *balairungnya* tidak mempunyai dinding. (Navis, 1984: 94).

selaku pelaksana pembimbingan dan pendidikan umat dalam hal peribadatan dan kehidupan keagamaan secara umum yang berpusat di masjid (makna *babalai bamusajik*).² (4) **Benteng** pertahanan keamanan dalam bentuk *huma* (pos keamanan terdepan) dan sistem penerangan (makna *bahuma babendang*). (5) **Sarana perhubungan/** pengaturannya, lalu lintas, perdagangan dan sarana kebersihan (makna *balabuah batapian*). (6) Sistem pertanian sebagai **basis perekonomian** masyarakat serta sistem hukum pengelolaan dan pewarisannya (makna *basawah baladang*). (7) Pengaturan sistem **rukun tetangga**, pesta keramaian, dan permainan/ keolahragaan (makna *bahalaman bapamedanan*). (8) Pengaturan **penyelenggaraan kematian** serta upacaranya (makna *bapandam bapusaro*).

Secara struktural, masyarakat *nagari* terdiri dari kelompok-kelompok kekerabatan berupa *suku* (*clan*), *kaum* (*lineage*), dan *paruik* (*sub-lineage*). *Paruik* adalah kelompok kekerabatan matrilineal yang terdiri dari tiga generasi (nenek, ibu, dan anak-anak), mendiami sebuah *rumah gadang* dan memiliki harta pusaka bersama tersendiri, dipimpin oleh seorang *tungganai*. *Kaum* terdiri dari satu atau beberapa *paruik*, dipimpin oleh *mamak kaum*, dan *suku* terdiri dari satu atau beberapa *kaum* yang dipimpin oleh *pangulu*. Sebuah *nagari* sekurangnya didiami oleh empat *suku* (*nagari bakaampek suku*) dan masing-masing memiliki kedudukan yang sama, sejajar, dan sederajat. Kekuasaan ada pada “kerapatan penghulu”, yaitu permusyawaratan para pemimpin *suku-suku* yang membentuk *nagari* itu. Dengan demikian, *nagari* merupakan federasi *suku*, *suku* merupakan federasi *kaum*, dan *kaum* merupakan federasi *paruik*. *Tungganai*, *mamak kaum*, dan *pangulu*, masing-masing merupakan pemimpin dalam sidang kelompoknya dan mewakili kelompoknya dalam sidang-sidang unit sosial yang lebih besar. Sidang *paruik*, sidang dewan *kaum*, sidang dewan *nagari*; merupakan kekuasaan tertinggi dalam unit-unit sosial bersangkutan (Manan, 2003).

Dengan demikian, *nagari* dapat dikatakan merupakan republik kecil yang otonom dalam sistem kepemimpinan tradisional Minangkabau, sistem yang dirajut dengan demokrasi dalam masyarakatnya yang egaliter. Kekuasaan tertinggi dalam masyarakat *nagari* adalah kebenaran, yang diperoleh melalui musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh unit sosial yang ada. *Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo*

² Dalam ketentuan *nagari* juga disebut bahwa pendirian sebuah *nagari* baru minimal terdiri dari empat *suku*, dan hanya boleh ada satu masjid dan satu balairung untuk setiap *nagari*.

ka pangulu, pangulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, bana barajo ka alue jo patuik (kemenakan beraja ke mamak, mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja ke mufakat, mufakat beraja ke nan benar/ 'kebenaran', benar/ 'kebenaran' beraja ke alur/ rasio dan patut/ etik). Hakekat kebenaran yang menjadi otoritas itu terletak pada dewan, yaitu sebuah abstraksi kebenaran yang harus dicari secara arif dalam suatu permusyawaratan dewan adat. Kekuasaan yang lahir dari permusyawaratan itu bersifat abstrak, relatif, yang dibuahkan dari penalaran rasional yang terbuka. Hal itu berbeda dari hakekat kekuasaan dalam sistem politik masyarakat Jawa tradisional yang meyakini kebenaran bersumber dari "raja" sebagai titisan dewa. Otonomi unit-unit sosial politik yang didukung oleh sumberdaya ekonomi yang memadai, sebagaimana terefleksi dari prasyarat berdirinya sebuah nagari, membawa kepercayaan akan kekuatan sendiri, dan karena itu mereka menghendaki desentralisasi. Jadi, nagari sebagai sebuah kesatuan sosio politik memiliki tiga karakteristik, sebagaimana diuraikan di atas, yaitu sebuah republik kecil yang otonom, demokratis, dan desentralistik (Manan, 2003).

Abstraksi dari uraian di atas adalah bahwa *nagari*, secara sosiologis, adalah unit organisasi sosial politik tertinggi, yang diperintah oleh suatu "Dewan Penghulu". Anggota dewan tersebut terdiri dari para penghulu perwakilan *suku* atau *clan*. Masing-masing *nagari* adalah otonom. Tidak ada kaitan secara struktural antara *nagari* yang satu terhadap *nagari* yang lain. Tidak juga (pernah) ada pemerintahan yang sentralistik atau pun kekuasaan federal yang mutlak. Para penghulu sebagai penguasa *nagari* bukanlah bertindak sebagai wakil dari raja yang berkedudukan di Pagaruyung, melainkan mewakili kelompok-kelompok *kaum/ clan* dalam *nagari* itu sendiri. Konsep yang dikukuhkan adalah *luhak bapangulu, rantau barajo (luhak* dipimpin penghulu, *rantau* diperintah oleh raja); artinya daerah utama Minangkabau (*luhak*) menganut sistem pemerintahan *nagari* yang diperintah oleh penghulu sedangkan daerah perluasan (*rantau*) diperintah oleh raja-raja sebagai perpanjangan tangan kekuasaan Pagaruyung. Kerajaan adalah kekuasaan *supra nagari* yang datang kemudian, asing, berbeda sumber keabsahannya, namun diperlukan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, sekalipun ada raja yang memerintah di Pagaruyung sejak abad ke 14, namun ia hanyalah bersifat simbolis belaka. Raja hanyalah penyatu simbolik Alam Minangkabau (berperan sebagai pendamai bila terjadi konflik antar *nagari*) (Josselin de Jong, 1960, Marsden, 1870; Oki, 1977; Abdullah, 1966). Oleh karena itu, banyak

pengamat mengidentikkan struktur sosio politik Minangkabau dengan sistem pemerintahan “polis/ negara kota” di Yunani Kuno. Identifikasi seperti itu didasari oleh kenyataan bahwa setiap *nagari* bertindak sebagaimana layaknya republik-republik kecil yang satu sama lain terlepas dari kekuasaan federal (Zed, 1996; Hasanuddin, 1999).

Gambaran di atas menunjukkan bahwa secara sosial masyarakat dikelompokkan ke dalam kelompok kekerabatan berupa *suku (clan)*, *kaum (lineage)*, dan *paruik (sub-lineage)*. Kelompok-kelompok itu disatukan ke dalam *nagari*. Masing-masing *nagari* adalah otonom sesuai dengan pepatah *adat salingka nagari* ‘adat selingkar *nagari*’. Pemekaran *nagari* sangat dimungkinkan terjadi. Alasan utama pemekaran adalah perkembangan alamiah kependudukan. Penduduk *nagari* yang telah padat biasa melakukan perpindahan untuk membuka pemukiman baru, yang lambat laun mendirikan lembaga adat sendiri sebagaimana di *nagari* asalnya, yaitu mendirikan sebuah *nagari* baru.³ Hal itu menunjukkan betapa secara internal Minangkabau membentuk pluralitas yang kompleks dan relasi antar komponen dikelola secara dinamik dan dialektik.

Nilai-nilai yang tercermin dalam karakteristik sosio kultural demikian adalah nilai kosmopolitan (manusia Minangkabau sebagai keturunan Iskandar Zulkarnain), kompleksitas plural Minangkabau secara internal (kesatuan-kesatuan lebih kecil berupa *suku/ clan*, kampung, *nagari*, dan pemekarannya), prinsip kesetaraan-kesejajaran, dan relasi-relasi antar kelompok secara egalitarian

KEARIFAN CROSS CULTURE

Ada empat bentuk representasi budaya berkaitan dengan kearifan *cross culture* yang diurai dalam makalah ini, yaitu Tambo Minangkabau, adat akomodasi kekerabatan di *ranah* dan *rantau*, seni konflik, dan sastra debat.

³ Navis (1984) menjelaskan bahwa *nagari-nagari* yang sempit umumnya mempunyai spesialisasi dalam hal kerajinan, industri, atau perdagangan. *Nagari* Koto Gadang dan Guguk memiliki spesialisasi kerajinan emas dan perak; *nagari* Ampek Angkek, Kubang dan Koto Gadang spesialis sulaman dan jahitan/konveksi; *nagari* Sungai Pua spesialis pandai besi; *nagari* Silungkang dan Pandai Sikek spesialis bertenun; orang Sianok spesialis berdagang tembakau, orang Maninjau dan Balingka spesialis pedagang kain; Pitalah dan Kotoa Anau spesialis pedagang ternak, Kumango spesialis kelontong. Demikian pula dalam hal makanan, *nagari-nagari* tertentu juga memiliki makanan-makanan spesial.

1. *Tambo Minangkabau*

Tambo Minangkabau, menurut Mansoer (1970: 38-39) memuat 2 persen saja fakta sejarah dan selebihnya adalah mitologi. Namun, yang terpenting di dalamnya bukanlah prihal fakta sejarah atau mitologi itu, sekalipun ianya terkategori historiografi tradisional Minangkabau.

Secara fisik, Tambo Minangkabau saat ini dapat ditemui berupa manuskrip. Sebagaimana dijelaskan Djamaris (1991), ada 58 Manuskrip Tambo Minangkabau yang ada di Leiden, 9 naskah di London, dan 17 naskah di Jakarta. Belum termasuk naskah-naskah yang ada di masyarakat hingga saat ini. Pada manuskrip yang berisi sejarah asal usul nenek moyang orang Minangkabau yang tidak bertarih tersebut diungkapkan suatu episode peristiwa kedatangan rombongan asing (*anggang dari lauik* 'enggang dari laut') yang hendak menguasai negeri mereka. Manuskrip itu menggambarkan ketika kedua belah pihak sudah berada dalam posisi "siap tempur", pihak Minangkabau menawarkan diplomasi (Toeah, tt).

Ada tiga bentuk diplomasi yang ditawarkan dan ditempuh secara bertahap, yakni adu kecerdasan melalui teka-teki dan adu kerbau. Adu kecerdasan terjadi pada dua perkara, yakni teka teki tentang kayu tataran dan unggas. Pertama, teka-teki kayu tataran. Disebutkan bahwa suatu ketika datang orang perahu dari laut membawa kayu tataran *Nago Pipik*. Mereka menantang untuk berteka-teki untuk menerka ujung dan pangkal kayu tataran tersebut dengan taruhan semua isi perahu mereka. Cati Reno Sudah, atas petunjuk Datuk Suri Dirajo, berhasil menentukan ujung dan pangkal kayu tersebut dengan *mangati* 'mengukur' panjangnya dengan sesuatu lalu melipat dua ukuran itu, dan pada titik tengah diikatnya kayu itu lalu dikati 'ditimbang' maka bagian yang lebih berat dinyatakan sebagai bagian pangkal dan yang lainnya adalah bagian ujung. Jawaban cerdas itu mengalahkan Sang Nakoda Besar dan semua hartanya diambil alih oleh petinggi Minangkabau (Djamaris, 1991: 230-231).

Kedua, teka-teki tentang unggas. Diceritakan bahwa beberapa lama antaranya, datang kembali Nakoda Besar ke Pulau Perca (Minangkabau). Mereka membawa sepasang unggas yang sama besar, rupa, paruh, dan bunyinya. Mereka menantang untuk menentukan mana jantan dan betina di antara kedua unggas itu. Teka-teki kali itu tanpa taruhan. Teka teki itu pun dimenangkan petinggi Minangkabau dengan menguji kedua unggas itu dengan memberi makan dan unggas yang kuat makannya dinyatakan sebagai

jantan. Nakoda Besar kalah lagi, malu, “*sekali-kali tiada termakan nasi dan sirih*” dan sejak itu tiada kembali ke Minangkabau (Djamaris, 1991: 231-232).

Adu kerbau bahkan disebut sebagai dasar asal usul nama Minangkabau. Diceritakan bahwa lama antaranya datanglah perahu dari laut membawa kerbau panjang tanduk, panjang badannya 15 depa, lebarnya delapan depa, panjang tanduknya masing-masing enam depa. Nakoda kapal menantang Datuk Katumanggung dan Datuk Perpatih Nan Sabatang untuk melakukan adu kerbau. Kedua datuk meminta waktu tujuh hari untuk mempersiapkan diri. Dicarinya anak kerbau sedang kuat menyusu. Di samping itu mereka siapkan tupang besi bercabang sembilan dan masing-masing cabang memiliki enam pucuk ‘ujung yang runcing’. Sehari sebelum beradu, anak kerbau itu dikarantina terpisah dari induknya sehingga sangatlah hausnya. Pada hari pertarungan, anak kerbau itu dipasangi tupang besi yang sudah dipersiapkan dan ketika dilepas di arena pertarungan ia langsung mengejar kerbau besar yang dikiranya adalah induknya. Pada saat anak kerbau itu mencari puting susu kerbau besar itulah tupang besi di kepalanya segera menusuk-nusuk perut si kerbau besar sehingga isi perutnya terburai dan mati. Kemenangan itulah dianggap sebagai asal usul nama Minangkabau, yakni dari kata *manang* ‘menang’ dan *kabau* ‘kerbau’ (Djamaris, 1991: 220-221).

Kisah teka-teki dan adu kerbau adalah simbol kearifan diplomatik dalam interaksi antar budaya atau *cross culture* yang mencerminkan nilai bahwa interaksi dalam dinamika perbedaan dan kesetaraan adalah persaingan dan konflik (dialektika tesis-antitesis) secara intelek dan karena itu bermartabat. Simbol tersebut merefleksikan pesan bahwa adu kecerdasan melalui teka-teki adalah konflik yang pantas bagi manusia yang memiliki kelebihan sebagai makhluk berakal. Konflik kekerasan atau anarkhi pantasnya adalah bagi makhluk Tuhan yang tidak berakal seperti kerbau.

2. Tradisi akomodasi kekerabatan

Ada dua pola interaksi aktual yang mentradisi pada masyarakat Minangkabau, sesuai dengan tempat interaksi *intercultural* itu berlangsung, yakni di *ranah* dan di *rantau*. *Ranah* adalah wilayah dalam *culture domain* orang Minangkabau dan *rantau* adalah wilayah di luar *culture domain* mereka. Interaksi lintas budaya di *ranah* mereka lakukan melalui akomodasi kekerabatan melalui *adat malakok*, sedangkan di *rantau* mereka melakukan adaptasi *mangaku induak*.

Malakok merupakan media yang berperan sebagai fasilitator bagi penempatan individu pendatang ke dalam suatu wadah atau lembaga kekerabatan, baik lembaga (suku atau *clan*) yang telah ada atau pun dengan mendirikan lembaga (suku atau *clan*) yang baru sama sekali. Dengan mengakomodasi seseorang pendatang ke dalam suatu lembaga kekerabatan maka seseorang itu telah memiliki basis komunal untuk dapat menjalankan peran sosial (hak dan kewajiban) dengan baik. Ungkapan Minangkabau tentang hal itu adalah *hinggak basicakam tabang basitumpu* 'hinggap bercekam terbang bertumpu'. Ibarat burung, basis komunal adalah ranting tempat seseorang hinggap dan berpegang (bercekam) kuat serta tempat seseorang bertumpu ketika hendak terbang. Dengan kata lain, basis komunal adalah tempat seorang pendatang memperoleh tempat layak untuk hidup dan bersosialisasi dengan pantas di luar domain kelompok asal mereka.

Pentingnya *malakok* dalam mewujudkan harmoni *intercultural* telah diungkapkan oleh beberapa peneliti, misalnya Syamsir (2000), Eriyanti (2004), dan Saptomo (2004:7). Sehubungan itu, Taufik Abdullah (2001:9) menegaskan bahwa *malakok* merupakan 'kearifan lokal' (*local wisdom*) yang dapat membantu mewujudkan keharmonisan antara etnik pendatang dengan etnik tuan rumah di Minangkabau Sumatera Barat. Eriyanti (2009) menjelaskan konsep *malakok* mirip dengan konsep *berkedim* di Negeri Sembilan Malaysia, konsep *membeli marga* dalam masyarakat Batak, konsep *peuseujuk* pada masyarakat adat Aceh, atau *pela gandong* di Maluku. Kesemua konsep tersebut memiliki tujuan yang hampir bersamaan dengan konsep *malakok*, yaitu untuk menjalin hubungan yang harmonis di antara 'pendatang' dan 'penerima'.

Ada beberapa variasi dalam tradisi *malakok* di Sumatera Barat. Di Tanjung Barulak Kabupaten Tanah Datar terdapat tradisi *malakok* dengan istilah lain *mangaku mamak*. Prosesi yang dijalani adalah "mengisi adat" dengan sejumlah uang dan mengadakan jamuan di *rumah gadang* suku 'clan' yang dimasuki. Di Kapalo Hilalang Kabupaten Padang Pariaman, selain pola *malakok* secara individual juga ditemui *malakok* secara komunal oleh sekelompok migran Jawa. Migran tersebut telah ada sejak zaman kolonial karena dibawa Belanda sebagai buruh perkebunan karet. Pasca kemerdekaan, ketika perkebunan tersebut dikelola oleh TNI, juga didatangkan buruh dari Jawa (Muntilan Kabupaten Magelang) untuk budidaya tanaman kopi sebanyak 50

KK. Tahun 1995, ada sekitar 100 KK asal Jawa di nagari itu. Atas usul Wali Korong Ali Amran Rahman (alm) Kerapatan Adat *Nagari* Kepala Hilalang yang dipimpin oleh Dt. Rajo Mangkuto (Suku Jambak) menyetujui pembentukan lembaga “suku dagang” di *nagari* itu. Dengan adanya lembaga ini, komunitas pendatang bukan etnik Minangkabau (waktu itu baru suku Jawa) berada di bawah kepemimpinan *pangulu dagang*.

Di Darmasraya, momentum *malakok* yang paling penting adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tewasnya salah seorang pengendara. Pada beberapa kasus di tempat lain, kasus yang sama bisa berakibat pembunuhan balasan oleh komunitas komunal si korban. Hal yang sebaliknya terjadi di Darmasraya melalui mediasi *malakok* atau *mangaku induak*. Dengan ritual dan seremonial *mangaku induak*, status anggota kerabat yang tewas akan digantikan oleh orang yang mengakibatkan tewasnya korban tadi. *Malakok* secara komunal juga dilakukan di Kabupaten Darmasraya, yang ditandai oleh penobatan empat “pangulu dagang” etnik Jawa pada awal Juni 2011 ini.

Di *rantau* atau di luar ranah budaya (*cultural domain*) mereka, orang Minangkabau mengakomodasikan diri ke dalam komunitas masyarakat setempat. Hasanuddin (2009) menunjukkan bahwa secara empiris masyarakat Minangkabau di Bali mampu hidup secara berdampingan secara harmonis dengan etnik Bali dan lainnya. Mereka adalah perantau yang adaptif, muslim kultural yang religius, pedagang yang egaliter-demokratis, dan masyarakat yang multikulturalis. Nilai-nilai yang mereka pegang teguh adalah sesuai dengan petuah adat yang berbunyi: “ibu ditinggal ibu dicari”, “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”, “masuk kandang kambing membebek masuk kandang harimau mengaum”, “jika anak pergi merantau, ibu cari sanak pun cari, induk semang cari dahulu”, dan berbagai ungkapan arif prihal interaksi *cross culture* lainnya.

Walaupun demikian, akomodasi atau asimilasi kultural yang mereka lakukan tidak serta merta mengakibatkan mereka mengalami krisis identitas dan berganti budaya dengan budaya setempat atau budaya yang baru sama sekali. Mereka juga berpegang pada keteguhan prinsip identitas, bahwa mereka “tidak akan hitam oleh arang, bukan kuning karena kunyit, berpantang enak karena santan”. Betapa pun adaptasi di *rantau* adalah sebuah keniscayaan, namun keteguhan identitas adalah keniscayaan yang sama

pentingnya. Dengan demikian, corak interaksi *cross culture* mereka adalah perbedaan, egalitarian, dan saling menghormati atas dasar kesetaraan.

3. Seni, Sastra, dan Mediasi Transformasi Konflik

Interaksi antar kelompok yang meniscayakan peneguhan identitas kelompok dan persaingan bahkan konflik antar kelompok memproyeksikan anarkhi dan disharmoni. Hal itu amat disadari oleh orang Minangkabau sehingga perlu dimediasi. Dalam konteks ini, mediasi konflik diperlukan bukan setelah anarkhi terjadi melainkan justru sebelumnya. Konflik anarkhi yang destruktif diprediksi dengan arif dan dengan demikian diantisipasi dengan bijak melalui mediasi seni dan permainan.

Seni Konflik

Seni konflik adalah seni yang mempresentasikan konflik dalam pertunjukannya. Salah satu seni konflik Minangkabau yang penting adalah *ulu ambek*. *Ulu ambek* lahir dan berkembang di Pariaman, yakni rantau pesisir barat Minangkabau yang saat ini meliputi wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. *Ulu ambek* berasal dari kata *ulu* 'hulu' dan *ambek* 'hambat' sehingga berarti serangan dan tangkisan. Dengan kata lain, *ulu ambek* merupakan permainan yang mempertunjukkan keterampilan pertarungan dengan gerakan-gerakan menyerang dan menangkis namun tanpa kontak fisik sehingga menyerupai pantomim persilatan. Gerakan-gerakan dilakukan mengikuti irama musik vokal *dampeang* yang dilantunkan oleh dua orang *tukang dampeang*.

Ulu ambek dipertunjukkan atau dimainkan oleh dua orang dari perguruan silat atau *nagari* yang berbeda. Berbeda dari pertunjukan *silek* 'silat' yang dimainkan oleh orang-orang seperguruan. Tingkat resiko konflik dalam *ulu ambek* relatif tinggi karena mempertaruhkan harga diri kelompok komunal dalam konteks antar perguruan dan antara *nagari* tersebut. Oleh karena itu, pertarungan tersebut mesti dimenej dengan arif dan bijak. Untuk itu pertunjukan tersebut dipimpin oleh dua orang *janang* yang bertindak sebagai wasit dan diawasi oleh para *ninik mamak* atau penghulu *nagari-nagari* yang terlibat. Tempat pertunjukan adalah *laga-laga* yang berarti tempat berlaga, tempat bertarung, tempat menentukan kalah menang, tempat menyaksikan siapa pemenang dan siapa pecundang (Hasanuddin, 2010a).⁴

⁴ Dalam perkembangannya, istilah *laga-laga* diganti dengan kata *pauleh* 'pengulas' atau 'penyambung', yang dalam konteks *ulu ambek* adalah penyambung silaturrehmi. Demikian pula istilah *pai balaga* 'pergi

Oleh karena dalam seni konflik tersebut dipertemukan dua orang dari dua komunitas petarung (perguruan silat atau *nagari*) berbeda maka konflik menjadi relatif sangat aktual walaupun tanpa kontak fisik. Aktualitas konflik tersebut dikuatkan oleh alasan pertarungan harga diri masing-masing komunitas komunal (perguruan silat atau *nagari*) di samping resiko malu—juga secara komunal—apabila dalam pertarungan tersebut satu pihak mengalami *buluih* atau kalah. Kekalahan dalam *ulu ambek* tersebut adalah keadaan dipermalukan di hadapan umum dan karena itu sangat “melukai” hati petarung dan komunitasnya. Oleh sebab itu, seni konflik adalah sekaligus seni yang mempresentasikan manajemen konflik secara komprehensif.

Ada dua citra visualisasi, yang menarik pada pertunjukan *ulu ambek*, yaitu bersalaman, dan bertarung. Pertama, ekspresi bersalaman dilakukan oleh seorang pemain kepada guru silat, *ninik mamak*, saudara seperguruan, *janang*, dan orang-orang yang turut serta dalam kelompok mereka. Ekspresi bersalaman mencerminkan permohonan restu dan kerelaan seorang pemain untuk melakukan pertarungan hidup mati (Hasanuddin, 2010a dan 2010b).

Kedua, permainan *ulu ambek* dilakukan oleh dua orang laki-laki (sejauh ini tidak pernah dilakukan oleh perempuan, kecuali oleh penari-penari di ISI Padang Panjang untuk kepentingan akademik). Permainan itu layaknya pertarungan, namun tidak terjadi kontak fisik di antara kedua pemain, sehingga Navis (1984:268) menyebutnya sebagai pantomim persilatan. Walaupun demikian, hakikatnya permainan itu adalah pertarungan tingkat tinggi dalam aliran silat yang digunakan dan memiliki konsekuensi *buluih* ‘bulus’ atau kalah dan memermalukan suatu pihak. Oleh sebab itu, pertunjukan tersebut tidak bisa diselenggarakan tanpa seizin *ninik mamak* atau *penghulu nagari* sebagai pemilik (karena *ulu ambek* adalah *suntiang* ‘mahkota’ mereka) dan tanpa *janang*. Oleh sebab itu, permainan tersebut dilangsungkan dalam pengawasan *pangulu* dari kedua belah pihak dan dipimpin oleh dua orang *janang*. *Janang* dituntut untuk mampu bersikap tegas dan adil. Oleh karena itu kepada *janang* diucapkan *sumpah sati* ‘sumpah sakti’ bahwa “apabila tidak bersikap adil maka akan dimakan sumpah Yang

berlaga’ berganti dengan istilah ‘*pai baralek*’ ‘pergi memenuhi undangan hajatan’. Dalam perubahan terminologi itu tercermin perubahan wacana dalam *ulu ambek*, yaitu dari pertarungan menjadi persahabatan atau konflik menjadi silaturahmi. Esensinya adalah wacana manajemen konflik (Hasanuddin, 2010b).

berisi: jika berbuat sawah padinya hampa, jika beternak ternaknya kurus, dan jika istrinya melahirkan maka anaknya lahir tanpa paha sebelah”.

Pada 1930-an pernah terjadi konflik *cakak balolong* antara *nagari* Mangguang dengan Mudiak Padang setelah pertunjukan *ulu ambek* (Martamin, 1977). *Cakak balolong* saat itu, menurut Imran (1977) bukanlah terpicu sesaat malainkan merupakan perpanjangan dari dendam kesumat akibat *buluih-buluih* dalam pertunjukan sebelumnya. Oleh sebab itu, sejak saat itu, permainan *ulu ambek* dijaga ketat agar tidak sampai berakhir dengan *buluih*. Pada saat itu, *ulu ambek* nyaris dilarang, tetapi karena keberadaannya dipandang sangat penting maka ia diambil alih oleh *ninik mamak*. Itu sebabnya *ulu ambek* dikatakan sebagai *sunting ninik mamak* atau *sunting pangulu*. Sebagai *sunting* atau mahkota *ulu ambek* hanya boleh dimainkan atas seizin *ninik mamak* atau *pangulu* dan pelaksanaannya dijaga ketat agar tidak menimbulkan sengketa. Motivasi *mambulihkan* ‘mempermalukan’ lawan dalam permainan itu juga dihilangkan. Pihak yang menunjukkan motivasi demikian akan dikucilkan. Pengucilan ternyata mampu memberi efek jera sehingga aturan itu cukup efektif dalam menjaga harmoni di antara *nagari-nagari* persekutuan *ulu ambek*.

Sastra Debat

Sastra debat adalah sastra lisan dialogis Minangkabau yang dalam pertunjukannya menghadirkan dua atau tiga kelompok penampil. Kelompok penampil berasal dari komunitas *surau* berbeda tetapi tampil dalam satu kesatuan pertunjukan secara dialogis. Semua kelompok penampil terlibat dalam perdebatan dalam bentuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada dan pada gilirannya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok penampil yang lain. Sastra lisan yang termasuk ke dalam kelompok sastra debat itu adalah *Salawat Dulang* dan *Indang*. *Salawat Dulang* berkembang di dataran tinggi Minangkabau seperti Tanah Datar dan Kabupaten Solok, sedangkan *indang* berkembang di pesisir barat Minangkabau tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman.

Salawat dulang

Salawat Dulang merupakan sastra lisan Minangkabau yang di beberapa daerah juga disebut dengan *Salawat Talam*, seperti di Pariaman dan Payakumbuh. Baik *Salawat*

Dulang maupun *Salawat Talam* pada dasarnya hanya berbeda istilah, namun tidak berbeda dari segi pertunjukannya.

Istilah *Salawat Dulang* ini berasal dari dua kata, yaitu *salawat* yang berarti 'salam atau doa untuk Nabi Muhammad SAW', dan *dulang* atau *talam*, yaitu 'piring besar terbuat dari loyang atau logam yang biasa digunakan oleh masyarakat Minangkabau untuk makan bersama'. Dalam sastra rakyat Minangkabau, pengertian *Salawat Dulang* adalah penceritaan kehidupan Nabi Muhammad, cerita yang memuji Nabi Muhammad, atau cerita yang berhubungan dengan persoalan agama Islam dengan diiringi irama ketukan jari pada dulang atau piring besar itu (Djamaris, 2002:150).

Dalam satu pertunjukan *Salawat Dulang* biasanya minimal terdiri atas dua grup salawat yang pada masa awal kelahirannya merupakan utusan atau wakil dari komunitas *surau-surau* berbeda. Struktur syair atau teks *Salawat Dulang* terdiri atas imbauan katubah, katubah, lagu batang, yamolai, lagu cancang, pengantar, buah/ isi, menjawab pertanyaan, memberi pertanyaan, hiburan, dan panutuik (Firdaus, 1990). Jadi, Salawat Dulang merupakan pertunjukan dengan melagukan bacaan salawat, kajian tarekat, kisah Nabi dan Rasul, dan juga masalah syariat yang disampaikan secara dialogis berdebat di antara kelompok penampil dari komunitas *surau* berbeda itu.

Indang

Indang adalah kesenian tiga dimensi: musik, tari, dan resitasi (Ediwar, 1999:2). Pemain menari sambil menyanyikan syair, diiringi instrumen rapa'i (rebana ukuran kecil). Syair berisi puji-pujian kepada Allah dan Rasul, teks bersumber dari Al Quran, riwayat nabi, riwayat syekh, dan kajian sifat Allah Nan Duo Puluh. Keberadaan kesenian ini erat kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam di Padang Pariaman. Kelompok *indang* muncul dan hidup di *surau-surau* dengan misi penyebaran dan pengembangan ajaran islam. Kelompok *indang* terdiri atas 8-22 pemain, semuanya laki-laki, seorang sebagai tukang *dikie* dan lainnya *anak indang*.

Tradisi *baindang* pada dasarnya adalah bertanding antara tiga kelompok untuk menguji kemampuan pengetahuan tentang berbagai aspek kehidupan lahir maupun batin. Kalah menangnya kelompok *indang* sangat memegang peranan penting dalam mengangkat harkat dan martabat *nagari* tempat kesenian itu dibina. Apabila kelompok *indang* mengalami kekalahan dalam bertanding, yang akan merasa malu bukanlah

kelompok *indang* itu saja tetapi juga seluruh warga *nagari*. Untuk mengantisipasi agar nama *nagari* tetap terpandang dengan kesenian *indangnya*, berbagai cara untuk memenangkan pertandingan dilakukan oleh *tuo indang*, termasuk dengan kekuatan *magic*, yaitu melemahkan kemampuan kelompok lawan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

Struktur pertunjukan *indang* adalah Tiga kelompok penyaji: pangka, alek I, dan alek 2. Pembukaan (permintaan izin dan kerelaan), *manasik* (kaji keislaman), *pasambahan* (sapaan dan permintaan maaf dan lainnya), *rundiangan* (pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan), penutup (permintaan untuk dijawab). Tanya jawab dan perdebatan berlangsung selama pertunjukan sehingga pertunjukan bersifat dialogis antar group penampil. Dalam pertunjukan itu, kelompok yang tidak mampu menjawab pertanyaan kelompok lain dianggap kalah dalam perdebatan itu.

Pola konflik segitiga melibatkan *Pangka, Alek 2, Alek 1*. Dalam *alek gadang* 'helat besar' yang berlangsung selama tujuh hari, akan tampil 21 group *indang*, dengan komposisi 7 *Pangka*, 7 *Alek 2*, dan 7 *Alek 1*. Tentu akan ada 6 kelompok yang berperan sebagai *Pangka*, yakni kelompok yang segugus dengan *nagari* penyelenggara. Ikatan satu gugus memiliki hubungan batin yang kuat. Dalam penentuan *Alek 2* dan *Alek 1* juga diperhatikan gugusnya. Tidak dibolehkan satu kelompok bertanding dengan kelompok yang segugus.

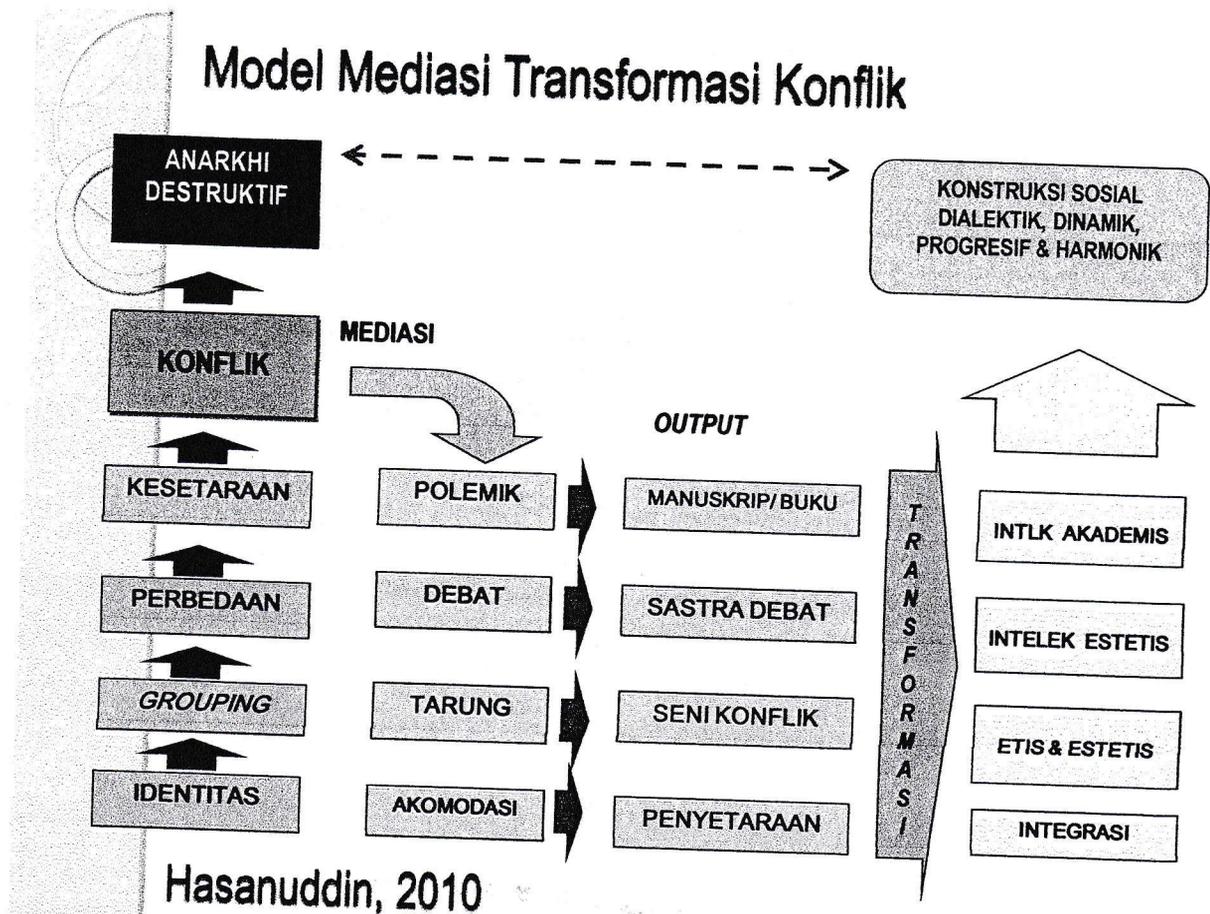
PENUTUP

Dalam dinamika perbedaan (dalam pluralitas), konflik dalam interaksi *cross culture* menjadi lumrah bahkan niscaya. Pada saat bersamaan, dinamika harmoni juga sama niscayanya. Oleh sebab itu, perbedaan dan konflik mesti dapat dimenej dengan bijak.

Konflik adalah relasi tesis dengan antitesis, relasi sebuah pernyataan dengan pernyataan lain yang kontradiktif, atau sebuah eksistensi dengan negasi atasnya. Manajemen perbedaan dan konflik dalam ekspresi budaya Minangkabau, sebagaimana diuraikan di atas, adalah berupa mediasi. Mediasi konflik dalam konteks ini bukan bermakna proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat melainkan proses penyediaan alat atau sarana perantara bagi terfasilitasinya naluri berkonflik sebagai konsekuensi dari perbedaan dan persaingan

sehingga konflik mengalami transformasi dari manifestasi potensialnya berupa anarkhi ke manifestasi yang lebih elegan, etis, intelek, atau estetis. Transformasi konflik adalah buah dari praktik dan produk mediasi yang dihasilkan secara kreatif.

Ekspresi budaya sebagaimana diuraikan di atas menggambarkan bagaimana identitas (kekhasan individu dan kelompok) diperlukan (disadari, diakui, dan diperjuangkan), perbedaan (akibat keragaman identitas yang diakui) disadari dan diberi posisi, dan konflik diniscayakan lalu dimenej sedemikian rupa sehingga tetap dalam lingkaran harmoni. Dengan demikian, konflik tidak diantisipasi, potensi latennya tidak dimatikan, tetapi dipupuk dan dialirkan sehingga dinamika sosio kultural dan interaksi *cross culture* berlangsung secara kreatif, dialektik, dan dinamis. Model mediasi transformasi konflik dalam interaksi *cross culture* adalah sebagaimana bagan dibawah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 2001. "Identity Maintenance and Crisis of Identity in Minangkabau". In Hans Mol (Ed.): *Identity and Religion: International Cross Cultural Approach*. London: Saga Publication Ltd.
- Coser, Lewis A. 1975. "Structure and Conflict". Dalam Peter M. Blau (ed.): *Approach to Study of Sosial Structure*. New York: The free Pers.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Suatu Analisis Kritik*. Edisi Indonesia. Jakarta: Rajawali
- Djamaris, Edwar. 1991. *Tambo Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ediwar. 1999. "Perjalanan Kesenian Indang dari Surau ke Seni Pertunjukan Rakyat Minangkabau di Padang Pariaman Sumatera Barat" (Tesis). Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada.
- Eriyanti, Fitri. 2004. *Integrasi Sosial Suku Bangsa Batak Mandailing dengan Minangkabau di Desa Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman* (Tesis). Padang: UNP.
- Eriyanti, Fitri. 2009. "Malakok, Suatu Mekanisme Pendamai Ala Minangkabau" Makalah Seminar Internasional Malindo Nusantara I (Bukittinggi 17-18 Desember).
- Fay, Brian. 2002. *Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Galtung, Johan. 2005. "Mencari Solusi yang Ampuh Bagi Konflik, Beberapa Tema yang Hilang" Dalam Dewi Fortuna Anwar, dkk (Eds.) *Konflik Kekerasan Internal, Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, LIPI, LASEMA-CNRS, KITLV-Jakarta.
- Hasanuddin. 2008. "Kearifan Lokal Merajut Multikulturalitas Masyarakat Minangkabau di Bali", Dipublikasikan dalam Suastika, Dkk: *Isu-Isu Kontemporer Cultural Studies*. Bandung: CV Bintang WarlyArtiks.
- Hasanuddin. 2009. "Wacana identitas Etnik Minangkabau di Bali" (Disertasi). Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Hasanuddin. 2010a. *Kearifan Lokal Mediasi dan Transformasi Konflik Dalam Seni Tradisi Ulu Ambek Di Sumatera Barat*. *Prosiding Seminar Lisan VII*. Pangkal Pinang: Asosiasi Tradisi Lisan (ATL), Pemerintah daerah Bangka Belitung, Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia Kemenbudpar (19-22 November).
- Hasanuddin. 2010b. "Wacana Manajemen Konflik dalam Ulu Ambek di Padang Pariaman". Dalam Jurnal *SALINGKA*, *Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Padang (Akreditasi B)*, (Vol.7, Nomor 2 Desember). Padang: Balai Bahasa.

- Imran, Mohd Nefi. 1997. "Ulu ambek Etnologi Seni Persembahan dalam Adat Minangkabau". Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Asia Tenggara Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya
- Manan, Imran. 2003. "Nagari Pra-Kolonial" *Nagari Dalam Perspektif Sejarah*, Drs. Efi Yandri, MSi (Ed). Lentera 21.
- Manggis, M. Rasjid. 1971. *Minangkabau, Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Padang: Sri Dharma.
- Mansoer, M.D., dkk. 1970. *Sejarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara.
- Naim, Mochtar. 1983. "Minangkabau dalam Dialektika Kebudayaan Nusantara". dalam A. A. Navis (ed.): *Dialektika Minangkabau Dalam Kemelut Sosial Politik*. Padang: Genta Singgalang.
- Naim, Mochtar. 1984. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Nasroen, M. 1971. *Dasar-dasar Filsafat Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Navis, A. A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafitipers.
- Polloma, Margaret M. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Edisi Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman, Syafruddin. 1990. "Sastra Lisan Indang di Minangkabau" (Laporan Penelitian). Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas untuk The Toyota Foundation.
- Suryadi. 2002. *Syair Sunur, Teks dan Konteks 'Otobiografi Seorang Ulama Minangkabau Abad Ke-19'*. Padang: Citra Budaya Indonesia.
- Syamsir. 2000. Hubungan Sosial Orang Minang dan Orang Nias di Kodya Padang (Tesis). Bandung: PPS Unpad
- Toeah, H. Datoek. Tt. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia
- Zed, Mestika. 1996. "Nagari Minangkabau, dan Pengaruh Sistem Kolonial". *Genta Budaya*. J.3 Th.I: 5-13.